

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2018). *AKUNTANSI PERPAJAKAN EDISI 3* (3rd ed.; E. S. Suharsi, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dianartini, K. D. (2020). *PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada .... 935–947*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v12i1.29045>
- Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 Tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat. , Website § (2007).
- Direktur Jenderal Pajak. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.* , (2013).
- Ermawati, N. . (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL STIE SEMARANG*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Fanuel, H., & Yusran, R. R. (2020). ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT TRI CIPTA GEMILANG Analysis Implementation of Taxation Obligations of Income Tax Article 21 for Employee Salaries on PT Tri Cipta Gemilang. *Jurnal EMBA*, 8(1), 538–545. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i1.28015>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.; P. P. Harto, Ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan.* , (2000).
- Keputusan Menteri Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* , (2003).
- Lubis, R. A., M, B., & Sari, E. N. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 2(1), 99–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjakk.v2i1.4468>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.* , (2013).
- Peraturan Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* , (2012).
- Peraturan Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.09/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.* , (2013).
- Peraturan Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan*

*Tidak Kena Pajak.*, (2016).

- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pranata, I. G. B. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 158–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p11>
- Purba, M. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal AKuntansi Bareleng*, 2, 89–103. Retrieved from <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/1604>
- Putri, N. E., & Putri, T. C. (2019). Keterkaitan Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kebayoran Baru III. *Ikraith Ekonomika*, 2(2), 95–104.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rismawati, S., & Antong, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2019). The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 347–359. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. *Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.*, (2011).
- Undang-Undang. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007.*, (2007).
- Undang-Undang Nomor 17. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000.*, (2000).